

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi suatu negara dapat tercermin dari kondisi lembaga intermediasi perbankannya. Jika perbankannya mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dan unit defisit dengan baik, maka kondisi perekonomian negara itu akan berjalan dengan baik pula. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi diharapkan dapat membantu mempersempit bahkan menghilangkan kesenjangan antara pihak surplus dana dan pihak defisit dana, baik secara individu maupun kelompok. Karena tidak dapat dipungkiri sebagian besar dana pembangunan bersumber dari perbankan.

Di Indonesia, selain perbankan konvensional kita juga mengenal perbankan syariah yang lahir dari keinginan kaum muslimin untuk melandasi segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah yang terlepas dari *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *tadlis* sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2: 278-279) berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَآ تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ {279}

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."*

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sejak tahun 1980-an mulai merintis usaha pendirian bank Islam guna memenuhi permintaan masyarakat yang membutuhkan alternatif jasa perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Setelah melalui proses yang cukup panjang, atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya didirikanlah bank syariah pertama di Indonesia dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Dengan berdirinya BMI ini, perbankan syariah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, sejak beroperasi 1 Mei 1992, bank syariah belum mendapatkan perhatian optimal dalam tatanan perbankan nasional sehingga pertumbuhannya sangat lambat. Hal ini dikarenakan belum adanya landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah yang terlihat jelas dalam uraian UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan dengan sistem bagi hasil hanya disisipkan saja. Akibat sangat kurangnya dukungan pemerintah tersebut, maka sampai dengan tahun 1998 hanya ada 1 bank syariah di Indonesia.

Ketidakseimbangan ekonomi global yang diikuti krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia pada tahun 1997 menunjukkan suatu bukti ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem ekonomi kapitalis yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan rentetan permasalahan ekonomi makro lainnya. Diduga, sistem ekonomi kapitalis dengan sistem bunganya merupakan penyebab terjadinya krisis.

Sistem perbankan konvensional yang digunakan Indonesia selama ini sebagai bagian dari sistem ekonomi kapitalis yang berbasis bunga juga mengalami keterpurukan yang parah. Hal ini terlihat dari kenyataan sejumlah besar bank ditutup, di *take over*, dan sebagian besar lainnya harus direkapitulasi dengan biaya ratusan triliun rupiah dari uang negara. Pada masa tersebutlah terbukti bahwa bank syariah yang melakukan pembiayaan berbasis sektor riil berdasarkan prinsip syariah Islam mampu bertahan di tengah badai krisis. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional terbukti telah menunjukkan peranan pentingnya dalam perekonomian Indonesia.

Menyadari peran perbankan syariah tersebut, pemerintah melakukan restrukturisasi perbankan dengan mengeluarkan UU No. 10 tahun 1998 sebagai

amandemen UU No. 7 tahun 1992 yang memperjelas dan memperkuat dasar kebijakan *dual banking system* di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diatur landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, sekaligus memberi arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998 tersebut segera direspon oleh pihak perbankan, yang ditunjukkan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) kedua di Indonesia. Respon positif juga ditunjukkan oleh perbankan konvensional dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimulai dari Bank IFI pada tahun 1999.

Namun demikian perkembangan perbankan syariah masih tergolong lambat untuk negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Guna menyokong perkembangan perbankan syariah dan menegakkan syariah Islam sebagai faktor utamanya, maka pada tanggal 16 Desember 2003 MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga bank. Fatwa ini diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan perbankan Indonesia. Eksistensi perbankan syariah semakin kukuh dengan dikeluarkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 Juli 2008 yang secara rinci mengatur perbankan syariah di Indonesia.

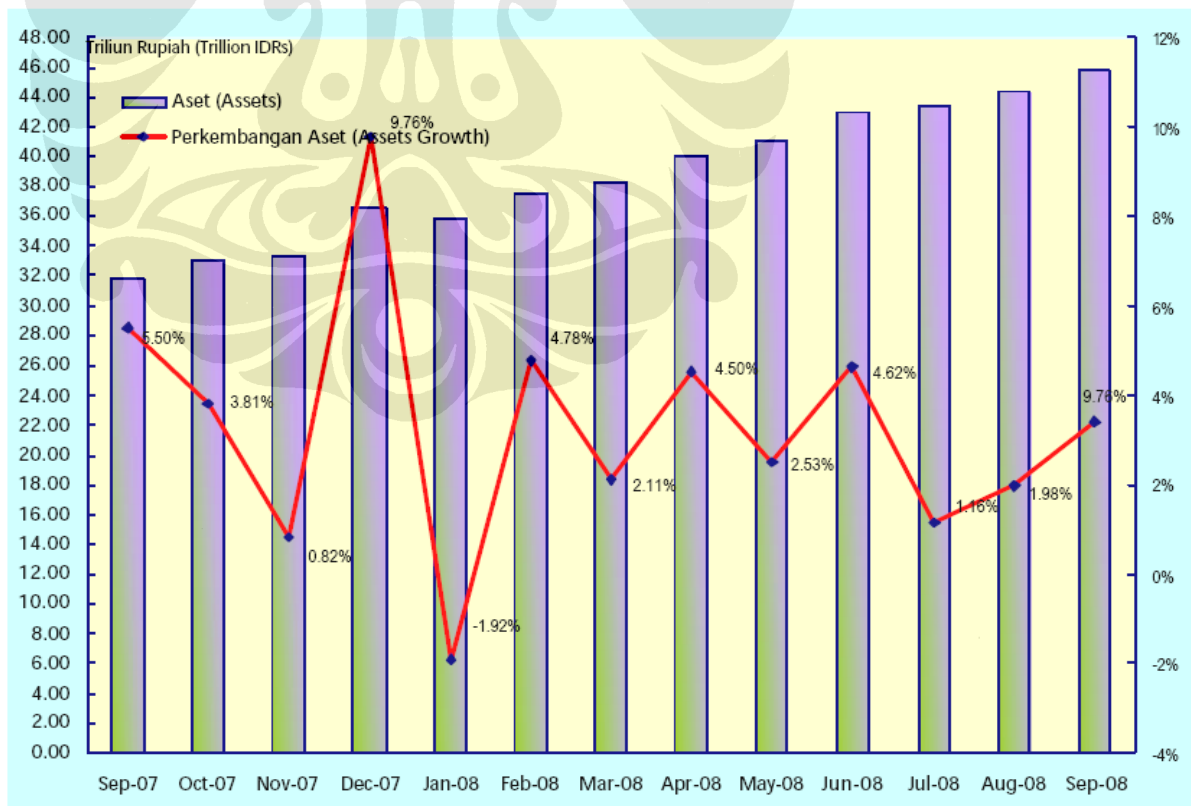
Perkembangan perbankan syariah memang semakin pesat sejak lima tahun terakhir yang terlihat dari pertumbuhannya selalu di atas 30%. Hal ini terlihat dari terus bertambahnya jumlah perbankan syariah di Indonesia, dimana sampai dengan September 2008 terdapat 3 Bank Umum syariah (BUS) dan 28 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 681 jaringan kantor.

Pertumbuhan perbankan syariah tersebut tidak terlepas dari peran dan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai regulator yang sangat mendukung, antara lain melalui kebijakan Program Akselerasi Pengembangan Bank Syariah (PAPBS) 2007-2008 yang salah satu sarannya adalah mendorong pertumbuhan sisi *supply* dan *demand* perbankan syariah.

Dukungan positif juga diberikan pemerintah melalui pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian, Boediono pada saat membuka Indonesia Sharia Expo

2007 yang menyatakan bahwa prinsip perekonomian syariah dapat dijadikan sarana optimalisasi usaha penanganan krisis sosial. Hal ini didukung pula melalui pernyataan Presiden Yudhoyono pada pembukaan Festival Ekonomi Syariah 16 Januari 2008 dengan menyatakan bahwa perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat mensukseskan pembangunan jangka menengah secara nasional. Presiden juga berharap pengembangan perbankan syariah dapat memberi *maslahat* lebih besar pada masyarakat dan kontribusinya lebih optimal dalam perekonomian nasional dan menyatakan bahwa perkembangan perbankan dan keuangan syariah merupakan salah satu agenda nasional.

Walaupun pertumbuhan perbankan syariah relatif fantastis, namun jika dilihat dari proporsinya terhadap perbankan nasional masih sangat kecil, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia belum terasa. Akibatnya pertumbuhan perbankan syariah belum menjadi solusi bagi permasalahan perekonomian nasional sebagaimana yang diharapkan.



Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah

Gambar 1.1 Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia

Pertumbuhan aset perbankan syariah ini memang lebih baik dari rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional. Namun sampai dengan September 2008 proporsi aset 2,16%, proporsi DPK 2,09%, dan proporsi pembiayaan 3,02%. Pertumbuhan ketiga indikator perbankan syariah ini juga dapat dikatakan relatif lambat untuk negara Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pencapaian proporsi perbankan syariah terhadap perbankan nasional ini juga sangat kontras dengan target pencapaian yang di harapkan Bank Indonesia sebesar 5% di akhir 2008 ini.

Tingginya pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia ini belum dapat dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Keberadaan dan keunggulan perbankan syariah baru dapat dirasakan apabila perbankan syariah telah memiliki proporsi yang signifikan dalam tatanan perekonomian nasional (Yusdani, 2005).

Karim (2005 dalam Cleopatra 2008) memberikan dua alasan mengapa volume perbankan syariah harus besar. Pertama adalah kestabilan ekonomi nasional. Dan yang kedua adalah kemampuan menarik dana syariah dari luar negeri. Dengan besarnya volume perbankan syariah maka kemampuan dalam melakukan penyerapan dana investasi dari luar negeri khususnya negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah akan menjadi besar. Karim juga menyatakan bahwa kecilnya proporsi aset perbankan syariah di Indonesia menyebabkan perbankan syariah belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan survey preferensi masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2000-2005, potensi pasar domestik perbankan syariah menunjukkan peluang pasar yang besar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Gamal (2005) dan Marketing Research Indonesia (2003). Apalagi ditambah dengan dukungan perkembangan keuangan syariah internasional yang pesat.

Perkembangan perbankan syariah tentu saja mengacu pada *demand* masyarakat terhadap produk dan jasa perbankan syariah. dan tidak dapat dipungkiri sebagian nasabah bank syariah dan masyarakat umumnya masih membandingkan *rate of return (equivalent rate/nisbah)* yang mampu diberikan perbankan syariah dengan tingkat bunga yang diberikan perbankan konvensional. Dalam sistem perbankan syariah sebenarnya *rate of return (equivalent rate/nisbah)* yang diberikan kepada nasabah merupakan hasil dari penyaluran dananya. Hasil penyaluran dana ini sendiri memiliki ketergantungan pada hasil usaha peminjam dana yang tentunya akan dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi.

Sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah tidak dapat dipungkiri juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara makro. Dimana pada saat jumlah uang beredar banyak akan menimbulkan kondisi inflasi yang akan mempengaruhi seluruh aspek perekonomian. Elder (2004) dalam penelitiannya menyatakan bahwa inflasi akan mempengaruhi besaran investasi, sedangkan hasil penelitian Wu dan Zhang (2001) mengungkapkan bahwa inflasi memperkecil jumlah dan ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi sebagai akibat kenaikan harga-harga akan berdampak pada sektor riil. Inflasi akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dan mengakibatkan menipisnya keuntungan perusahaan yang akan mempengaruhi ukuran perusahaan kemudian perlahan akan mempengaruhi jumlah perusahaan yang mampu bertahan pada kondisi inflasi.

Selain itu, depresiasi nilai tukar mata uang asing dapat mengakibatkan kerugian bagi perbankan. Depresiasi nilai tukar merupakan keuntungan bagi nasabah yang memiliki dana besar dalam bentuk valuta asing seperti US dolar (USD). Hal ini yang mendorong nasabah tersebut untuk mengkonversi dananya ke dalam bentuk US dolar (USD). Bagi perbankan, depresiasi ini mengakibatkan tingginya kewajiban yang berdampak pada kerugian akibat selisih kurs atau menurunnya kinerja perbankan dalam menghimpun dana pihak ketiga.

Keynes (Asfia, 2006) menyatakan, tabungan dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat bukan dipengaruhi oleh tingkat bunga. Apabila penghasilan masyarakat lebih tinggi dari konsumsinya maka akan terjadi saving. Tetapi apabila penghasilan masyarakat

lebih rendah dari konsumsi yang harus dikeluarkannya maka akan terjadi *dissaving*.

Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa kondisi makro ekonomi mempengaruhi kemampuan perusahaan dan masyarakat untuk bertransaksi dengan perbankan, khususnya dalam penghimpunan dana. Di Indonesia sekitar 70%-80% aset perbankan dibentuk dari dana pihak ketiga, sehingga pengaruh kondisi variabel makro tersebut juga akan berdampak pada aset perbankan syariah.

Adanya pengaruh variabel makro jumlah uang beredar, kurs, dan *equivalent rate* ini terhadap penghimpunan dana sesuai dengan penelitian Farikh (2007), Yunita (2008), Maries (2008). Hasil penelitian Maries (2008) juga menunjukkan bahwa variabel makro tersebut berpengaruh pula pada pembiayaan. Sedangkan hasil penelitian Cleopatra (2008) menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap proporsi aset perbankan syariah namun inflasi tidak berpengaruh.

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ukuran aset dan permodalan yang besar berpengaruh positif terhadap kesehatan bank. Berger (1993) menyatakan bahwa dengan asas *economic of scale* peningkatan ukuran aset perbankan akan berdampak pada efisiensi operasional, terutama biaya pemanfaatan teknologi perbankan yang pada gilirannya menyebabkan efisiensi profit yang akan memantapkan stabilitas bank dalam industri perbankan nasional. Penelitian Benstor (1965 dan 1972), Bell dan Murpgy (1968) menunjukkan bahwa secara statistik pertumbuhan bank hingga dua kali lipat akan mereduksi biaya rata-rata hingga 5%-8% (Cleopatra, 2008).

Agar perbankan syariah semakin kokoh dan memberikan manfaat yang lebih besar dalam perekonomian Indonesia harus didukung dengan peningkatan *asset share* dan *market share*nya. Besaran dana pihak ketiga dan pembiayaan merupakan komponen yang penting yang turut menentukan perkembangan aset perbankan syariah. Tingkat dana pihak ketiga dan pembiayaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal perbankan syariah sehingga perbankan syariah harus mencermati faktor-faktor tersebut dalam menjalankan tata kelolanya agar tidak rentan terhadap perubahan variabel ekonomi makro.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengaruh pertumbuhan variabel ekonomi makro dan *equivalent rate* terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Dari sekitar 200 juta jiwa penduduknya sebanyak sekitar 80% beragama Islam. Kondisi ini merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi perbankan syariah yang telah beroperasi selama 16 tahun di Indonesia.

Statistik perbankan syariah yang dipublikasikan Bank Indonesia memperlihatkan pula bahwa sampai dengan bulan September 2008 proporsi aset perbankan syariah di Indonesia belum memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan masih mencapai 2,16% (Rp 45,9 Triliun) dari total aset perbankan nasional. Hal ini menunjukkan masih rendahnya aset perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah dalam tesis ini adalah rendahnya aset perbankan syariah di Indonesia, seharusnya dengan potensi pasar yang ada aset perbankan syariah Indonesia dapat lebih tinggi. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan banyak faktor yang dapat mempengaruhi aset perbankan syariah di Indonesia, baik dari sisi internal maupun eksternal perbankan syariah itu sendiri. Perubahan variabel ekonomi makro umumnya akan berdampak pada hampir seluruh sektor perekonomian, termasuk perbankan syariah.

Mengacu pada perumusan masalah tersebut di atas perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel makro dan tingkat *return* (*equivalent rate*) terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- 3) Bagaimana pengaruh pertumbuhan variabel ekonomi makro (pertumbuhan M_2 , pertumbuhan kurs, dan pertumbuhan *Gross Domestic Product*/GDP) terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia?
- 4) Bagaimana pengaruh *equivalent rate* terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan variabel ekonomi makro (pertumbuhan M_2 , pertumbuhan kurs, dan pertumbuhan *Gross Domestic Product/GDP*) terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh tingkat *return (equivalent rate)* terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai masukan bagi pihak manajemen perbankan syariah di Indonesia dalam mengambil kebijakan guna memperlancar fungsi intermediasinya dalam keterkaitannya dengan perubahan variabel ekonomi makro dan peningkatan daya saing perbankan syariah dalam penentuan tingkat *return (equivalent rate)*
- 2) Sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan bagi pihak perbankan syariah dan Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan dana pihak ketiga dan pembiayaan guna memperbesar *asset share* perbankan syariah.
- 3) Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademik maupun pihak yang *concern* terhadap perbankan syariah dalam melakukan pengembangan penelitian lanjutan.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas hubungan pertumbuhan variabel ekonomi makro (pertumbuhan M_2 , pertumbuhan kurs, dan pertumbuhan *Gross Domestic Product/GDP*) sebagai faktor eksternal perbankan syariah dan tingkat *return (equivalent rate)* sebagai faktor internal perbankan syariah terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia (*ceteris paribus*) dan tidak melihat

pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia dari sisi lain. Penelitian ini menggunakan data *time series* dari Bank Indonesia untuk periode Maret 2004 s.d. September 2008.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu konsep model tentang suatu teori atau membuat hubungan antar beberapa variabel secara logika berdasarkan permasalahan yang dibahas.

Pertumbuhan aset adalah salah satu indikator perkembangan perbankan yang tidak terlepas dari pertumbuhan dana pihak ketiga dan pembiayaan. Perkembangan perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan sangat dipengaruhi oleh perkembangan dana pihak ketiga yang dihimpun dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan tersebut. Hal ini antara lain dikarenakan di Indonesia umumnya 70%-80% aset perbankan bersumber dari dana pihak ketiga.

Gross domestic Product (GDP) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu karena *Gross domestic Product* (GDP) mengukur pendapatan total sekaligus pengeluaran total atas berbagai barang dan jasa dalam suatu perekonomian, dan *Gross domestic Product* (GDP) yang lebih besar memungkinkan kita hidup lebih sejahtera (Mankiw, 2003). *Gross domestic Product* (GDP) ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa (Mankiw, 2003), sehingga besaran *Gross domestic Product* (GDP) akan mempengaruhi fungsi *saving* dan pembiayaan pada perbankan. Dimana semakin besar *Gross domestic Product* (GDP) tentu akan semakin sejahtera masyarakatnya, semakin sejahtera masyarakat tentunya akan semakin besar pula kemampuannya dalam *saving* dan melakukan pembiayaan guna membiayai investasinya.

Saving hanya dapat dilakukan oleh masyarakat jika mereka memiliki kelebihan pendapatan setelah melakukan pengeluaran untuk konsumsi. hal ini biasanya dalam literatur bahasa Inggris disebut sebagai *saving is unspent income*, jadi tabungan/*saving* adalah bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan untuk

konsumsi ($S = Y - C$). Apabila pendapatan hanya mampu memenuhi kebutuhan untuk konsumsi dengan kata lain pendapatan yang diterima seluruhnya digunakan untuk konsumsi ($Y = C$) maka berarti kelompok masyarakat ini tidak memiliki kelebihan pendapatan (*zero saving*). Dan jika kelompok masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi pengeluaran konsumsi karena pendapatannya lebih kecil dari konsumsinya ($Y < C$) maka artinya tabungan mereka negatif atau *dissaving* (Munir, 1995).

Kondisi perekonomian juga akan mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan, yang kemudian akan mempengaruhi besaran aset perbankan tersebut. Sebagaimana diketahui, perkembangan perekonomian suatu negara selalu mengalami kondisi naik turun, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. Perubahan atau berfluktuasinya variabel ekonomi makro akan mengubah kondisi ekonomi makro suatu negara. Perubahan ini akan membawa berbagai macam dampak bagi perekonomian negara tersebut, antara lain *multiplier effect*nya terjadi pada *saving* dan kredit/pembiayaan masyarakat yang akan berdampak pada penambahan volume aset perbankan syariah.

Tidak dapat dipungkiri sisi ekonomi makro juga akan mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga dan pembiayaan antara lain melalui mekanisme nilai *equivalent rate*, dimana besaran *equivalent rate* itu sendiri dipengaruhi oleh inflasi yang merupakan indikator besaran M_2 .

Perubahan M_2 akan merubah pula jumlah kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Besaran jumlah uang beredar (M_2) memiliki peranan yang penting dalam kegiatan bisnis, antara lain dalam perubahan naik dan turunnya jumlah produksi. Saat produksi meningkat, akan tersedia lapangan kerja dan sebaliknya saat produksi menurun akan sulit mendapatkan pekerjaan (Mishkin, 2004). Hal ini tentu saja akan mengganggu fungsi *saving* dari para pelaku ekonomi, yang lebih lanjutnya akan mempengaruhi aset perbankan syariah.

Perubahan M_2 yang diindikasikan dengan perubahan tingkat inflasi berdampak sangat luas dan beraneka ragam. Terjadinya perubahan M_2 yang menyebabkan meningkatnya inflasi akan menyebabkan sektor-sektor ekonomi melemah, terutama yang berkaitan dengan sektor riil. Inflasi yang terus berlanjut

apalagi di atas 10% akan berpengaruh pada distribusi pendapatan dan alokasi faktor produksi nasional (Khalwaty, 2000).

Pada saat M_2 lebih besar dari jumlah produksi yang tersedia di pasar maka ini berarti telah terjadi inflasi. Pada kondisi ini, masyarakat yang berpendapatan tetap akan mengalami penurunan nilai riil dari pendapatannya, akibatnya daya beli mereka menjadi turun lemah. Dengan melemahnya daya beli masyarakat tersebut tentu masyarakat akan membutuhkan lebih banyak uang untuk melakukan transaksi, hal ini tentu saja dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan *saving* mereka dan bahkan dapat pula menjadi *dissaving*.

Selain berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan perusahaan karena menurunnya daya beli masyarakat, kondisi M_2 yang diikuti inflasi juga berpengaruh pada biaya produksi. Seiring dengan meningkatnya harga faktor-faktor produksi tentu saja biaya produksi akan meningkat pula, hal ini tentunya akan meningkatkan harga-harga produk sebagai hasil produksi. Sedangkan di sisi lain, daya beli masyarakat melemah sebagai akibat inflasi tentu saja harga produk menjadi tidak kompetitif di pasar dan hal ini akan mengurangi keuntungan perusahaan (Slifer, 1995). Berkurangnya kemampuan perusahaan akan menyebabkan berkurang pula kemampuannya bertransaksi dengan perbankan baik dari sisi dana pihak ketiga maupun pembiayaan.

Kondisi berkurangnya kemampuan dan kemauan bertransaksi dengan perbankan sebagai akibat banyaknya jumlah uang beredar yang diikuti inflasi tersebut di atas akan menyebabkan bagi hasil (*nisbah*) yang diberikan nasabah kepada perbankan syariah menurun dan akan berpengaruh pada penurunan *equivalent ratenya (nisbah)* yang dapat diberikan pada pihak pemilik dana (dana pihak ketiga) pada gilirannya hal ini dapat mengurangi pertumbuhan dana pihak ketiga maupun pembiayaan. Sedangkan untuk jenis produk berbasis *margin*, kondisi inflasi akan diikuti dengan meningkatnya *margin* pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah, sehingga menyebabkan pembiayaan menjadi mahal. Peningkatan *margin* di tengah lesunya sektor riil akan semakin melemahkan investasi karena pada saat itu perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan keuntungan. Akibatnya jumlah pembiayaan perbankan akan

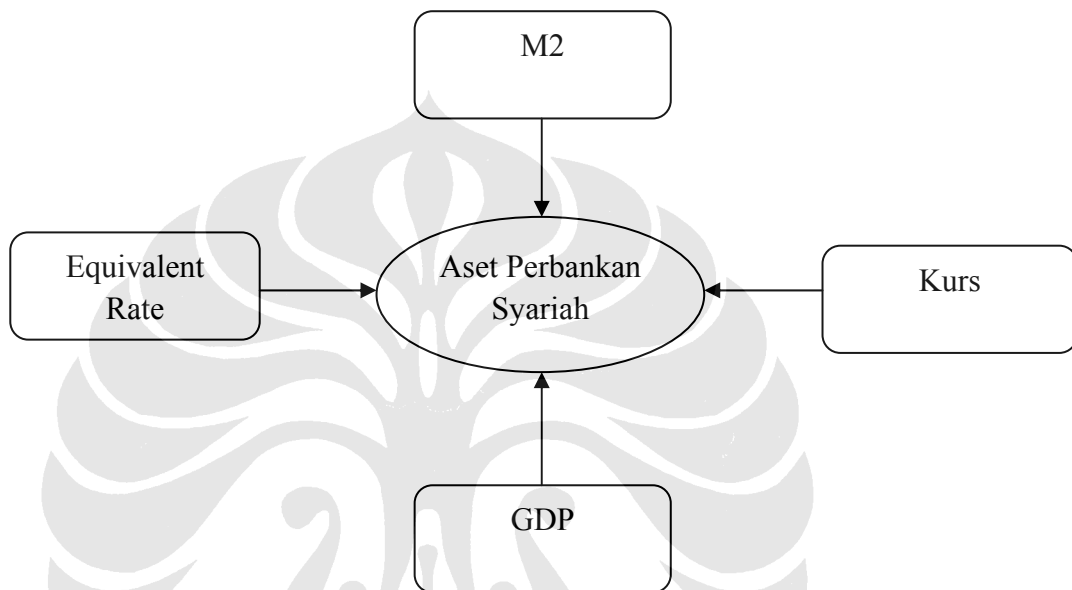
berkurang dan akan berdampak pengurangan kemampulabaabnya yang akhirnya akan berdampak pula pada pengurangan pertumbuhan aset perbankan syariah.

Valuta asing juga memiliki peranan yang cukup penting dalam pengelolaan likuiditas mata uang asing di perbankan. Apabila rupiah terdepresiasi maka akan terjadi penarikan dana pihak ketiga khususnya dalam bentuk US dollar (USD). Hal ini dikarenakan pemilik dana tersebut mengalami keuntungan dari selisih kenaikan kurs. Kondisi tingginya *demand* atas US dollar (USD) ini tentu saja akan melemahkan nilai rupiah (IDR). Jika dilihat dari sisi makro, terdepresiasinya nilai rupiah (IDR) akan mengakibatkan berkurangnya konsumsi atas barang-barang impor karena harganya yang meningkat sebagai dampak depresiasi IDR.

Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya konsumsi produk dalam negeri yang menggunakan faktor-faktor produksi domestik, sehingga barang dalam negeri akan menjadi kompetitif. Karena meningkatnya permintaan barang dalam negeri maka akan memacu produsen untuk memproduksi dan melakukan ekspor. Namun jika produksi dalam negeri menggunakan faktor produksi impor tentunya akan meningkatkan biaya produksi. Dan jika konsumen tidak dapat beralih pada barang produksi yang menggunakan faktor produksi domestik maka akan menyebabkan menurunnya nilai pendapatan riilnya.

Penurunan nilai pendapatan riil ini tentunya akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam bertransaksi dengan perbankan baik untuk melakukan *saving* atau pembiayaan. Dikarena pendapatannya lebih harus lebih banyak dialokasikan untuk konsumsi. Sedangkan perusahaan akan sulit melakukan investasi pada kondisi kurs yang tidak stabil, dikarenakan umumnya perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi impor seperti misalnya mesin-mesin produksi atau bahan baku. Sehingga jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan pada sektor riil juga terganggu. Dan tentunya hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan, khususnya perbankan syariah.

Adapun hubungan antara pertumbuhan variabel ekonomi makro berupa M_2 , kurs, dan GDP serta *equivalent rate* terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Hubungan Antara Variabel Makroekonomi dan Equivalent Rate Terhadap Aset Perbankan Syariah

1.7 Hipotesis

Berdasarkan masalah dan kerangka pemikiran maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

3) Hipotesis 1

H_0 : pertumbuhan variabel makro (pertumbuhan M_2 , pertumbuhan kurs, dan pertumbuhan *Gross Domestic Product*/GDP) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia

H_1 : pertumbuhan variabel makro (pertumbuhan M_2 , pertumbuhan kurs, dan pertumbuhan *Gross Domestic Product*/GDP) berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia

4) Hipotesis 2

H₀: *equivalent rate* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia

H₁: *equivalent rate* berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia

1.8 Metodologi Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan M₂, pertumbuhan kurs, pertumbuhan *Gross Domestic Product/GDP*, dan *equivalent rate* sebagai variabel independen. Sedangkan sebagai variabel dependen digunakan pertumbuhan aset perbankan syariah. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* periode Maret 2004 s.d. September 2008 yang bersumber dari Bank Indonesia baik berupa data publikasi maupun non publikasi.

Metode yang digunakan didalam tesis ini adalah inferensi kuantitatif terhadap data sekunder. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari Bank Indonesia dan sumber-sumber data lain yang diakses secara bebas melalui internet. Dalam mengolah data digunakan *software* Excel, SPSS versi 16.0, dan EVIEWS versi 4.1.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda atau biasa juga disebut *Multi Linear Regression* (MLR). Data akan diuji dengan menggunakan uji t untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan uji F untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dan melihat seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen melalui nilai R² (koefisien determinan). Tesis ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% ($\alpha = 5\%$) dengan menggunakan metode estimasi kuadrat terkecil atau biasa disebut *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengetahui besarnya pengaruh pertumbuhan variabel ekonomi makro (pertumbuhan M₂, pertumbuhan kurs, dan pertumbuhan *Gross Domestic Product/GDP*) serta *equivalent rate* terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia.

1.9 Sistematika Pembahasan

- Bab 1: merupakan pendahuluan dari tesis, di dalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan tesis.
- Bab 2: berisikan landasan teori yang berkaitan dengan variabel ekonomi makro berupa M_2 , kurs, *Gross Domestic Product* (GDP), *equivalent rate*, dan aset perbankan khususnya perbankan syariah serta penelitian sejenis yang menjadi referensi.
- Bab 3: mencantumkan metodologi penelitian yang menjelaskan tentang data dan alat analisis data serta model yang digunakan dalam penelitian.
- Bab 4: membahas dan menganalisis hasil dari penerapan model yang berkaitan dengan permasalahan dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.
- Bab 5: bagian ini memuat kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data yang telah dilakukan.